

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

RINGKASAN SKRIPSI



FITRI NOVITA HARIYANTI

1117 29959

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2021

SKRIPSI

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH TERHADAP KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

FITRI NOVITA HARIYANTI

No Induk Mahasiswa: 111729959

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 20 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar


Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim/Penguji:

Pembimbing



Endang Setyowati, Dra., M.Si.

Penguji


Algifari, Drs., M.Si.

Yogyakarta, 20 Agustus 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua




Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Fitri Novita Hariyanti

1117 29959

**Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
Yogyakarta**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2019 yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda dilengkapi dengan uji asumsi klasik serta uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Retribusi Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Kemandirian Keuangan Daerah

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Regional Taxes, Regional Levies, and Other Legitimate Local Revenues on Regional Financial Independence in the Special Region of Yogyakarta Province. The population in this study are regencies and cities located in the Special Region of Yogyakarta Province which consists of Kulon Progo Regency, Bantul Regency, Gunung Kidul Regency, Sleman Regency, and Yogyakarta City. The data source used is secondary data in the form of Realization Reports of Regional Revenue and Expenditure Budgets in the Province of the Special Region of Yogyakarta for

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2012-2019 obtained from the official website of the Central Statistics Agency (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The data technique used in this research is descriptive statistical analysis and multiple regression analysis equipped with classical assumption test and hypothesis testing. The results of this study indicate that regional taxes have a positive effect on regional financial independence, regional levies have no positive effect on regional financial independence, and other legitimate local revenue has no positive effect on regional financial independence.

Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, Other Legitimate Income, Regional Financial Independence

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai banyak daerah yang mencakup provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, sehingga mempersulit pemerintah pusat untuk mengkoordinasi antar daerah, maka pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi agar mengurangi kesenjangan suatu daerah dan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Bentuk dari asas desentralisasi tersebut adalah otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kekuasaan, kewenangan, dan tanggung jawab suatu daerah agar mandiri dalam membuat dan menyelesaikan sendiri kegiatan pemerintahan daerahnya yang sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang. Hal ini diperkuat dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan mengenai pemisahan dan pengelolaan daerah yang bersifat mandiri dalam melaksanakan asas desentralisasi.

Adanya kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kekuasaan cukup memadai dalam menyusun rencana. Manfaat dari pembangunan yang dilaksanakan diantaranya membatasi campur tangan dengan pemerintah pusat, meningkatkan kemakmuran masyarakat, pemerataan setiap daerah, meningkatkan perkembangan daerah dalam sektor ekonomi. Di dalam otonomi daerah Kemandirian keuangan daerah merupakan bagian dari administrasi keuangan daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan otonomi daerah, karena yang menjadi tolak ukur paling utama ialah keuangan. Pada prinsipnya, daerah otonom bergantung pada daerah yang mampu dalam memanfaatkan sumber-sumber keuangan daerah.

Sumber-sumber penghasilan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan Pinjaman Daerah. PAD ialah parameter terpenting untuk mengukur kemandirian dan kemampuan keuangan daerah, hal ini menjadikan PAD sebagai penerimaan daerah paling dominan agar bisa dimanfaatkan untuk mendanai pembiayaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah serta meminimalkan ketergantungan pada pemerintah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pusat. Sumber-sumber PAD mencakup hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk daerah mandiri yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan kebijakan otonomi daerahnya. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi daerah yang cukup banyak, salah satunya dari PAD karena sebagai penerimaan daerah paling dominan.

Tabel 1
Realisasi PAD Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019

| Pemerintah Daerah | Realisasi PAD (Ribu Rupiah) |
|-------------------------------|--|
| Kabupaten Kulon Progo | 237.876.805 |
| Kabupaten Bantul | 505.929.470 |
| Kabupaten Gunung Kidul | 253.236.641 |
| Kabupaten Sleman | 903.278.920 |
| Kota Yogyakarta | 689.049.730 |

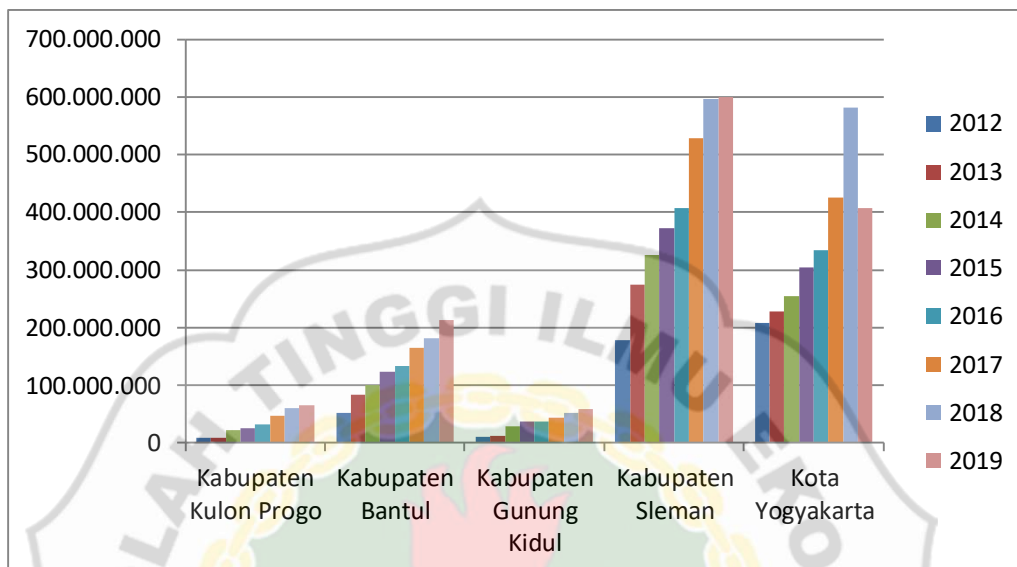
Sumber : Statistik Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta 2019-2020

Berdasarkan dari tabel 1.1 yang tersaji menunjukkan realisasi PAD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 sangat bervariasi. Kabupaten Sleman memiliki realisasi PAD tertinggi ialah sebesar 903.278.920 rupiah. Kabupaten Sleman sebagai Kabupaten dengan PAD terbesar, tentunya berupaya untuk menggali sumber penerimaan PAD, agar penerimaan dari PAD dapat terus ditingkatkan dalam mewujudkan dan menyelenggarakan otonomi daerah.

Sumber-sumber dari PAD salah satunya adalah pajak daerah. Gambar 1.1 menunjukkan besarnya perolehan pajak daerah lima kabupaten/ kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Gambar 1
Grafik Realisasi Pajak Daerah Lima Kabupaten/ Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



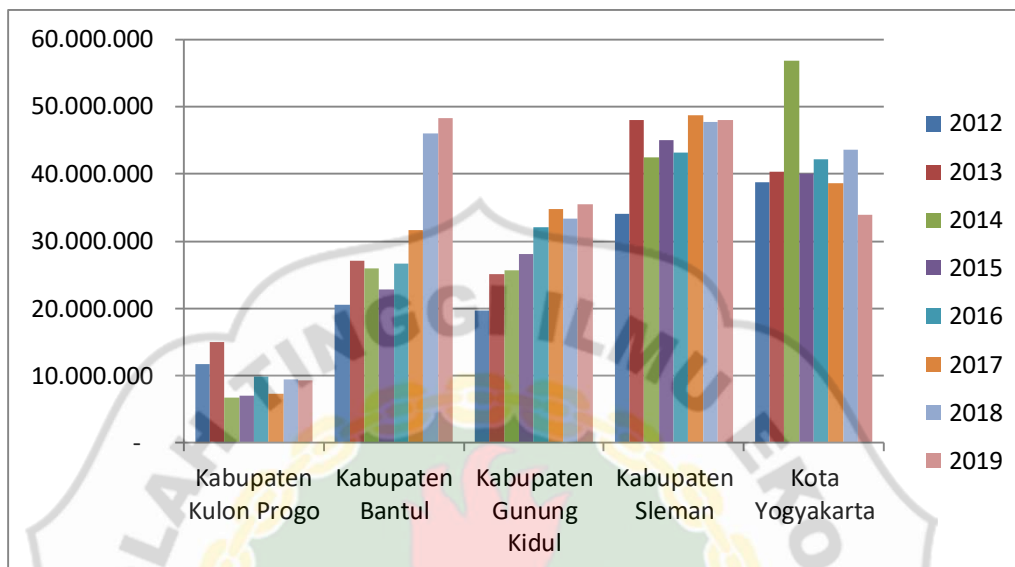
Sumber : Hasil olahan data sekunder dari Statistik Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2019

Dari gambar 1.1 menunjukkan bahwa realisasi perolehan pajak daerah dari lima kabupaten/ kota dari 2012 sampai dengan 2019 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, hanya saja di Kota Yogyakarta mengalami penurunan pada tahun 2019. Semakin tinggi pajak daerah, artinya semakin banyak arus dana yang masuk sebagai penambah pemasukan daerah, maka pemerintah daerah berupaya dalam mendukung perekonomian daerah.

Sumber-sumber dari PAD selain pajak daerah adalah retribusi daerah. Gambar 1.2 menunjukkan realisasi penerimaan retribusi daerah lima kabupaten/ kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Gambar 1
Grafik Realisasi Retribusi Daerah Lima Kabupaten/ Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



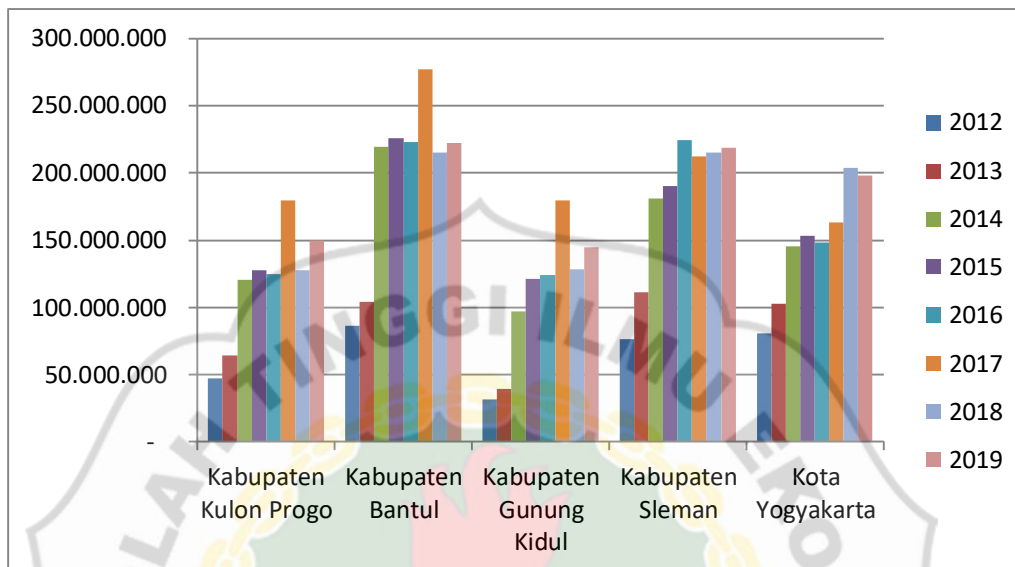
Sumber : Hasil olahan data sekunder dari Statistik Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2019

Dari gambar 1.2 menunjukkan bahwa besarnya perolehan Retribusi Daerah dari lima kabupaten/ kota tidak sebesar dengan perolehan pajak daerah. Apabila dilihat pada lima kabupaten/ kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memperoleh retribusi daerah terbesar ialah Kota Yogyakarta di tahun 2014. Semakin banyak retribusi daerah yang diterima terhadap PAD, maka pengembalian dana atas pengalokasian dalam pembiayaan terkait penyediaan fasilitas umum juga mengalami peningkatan, sehingga PAD bisa terus ditingkatkan.

Selain kedua sumber utama penghasilan PAD yang telah dibahas adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Gambar 1.3 menunjukkan besarnya perolehan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah lima kabupaten/ kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Gambar 2
Grafik Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lima Kabupaten/ Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



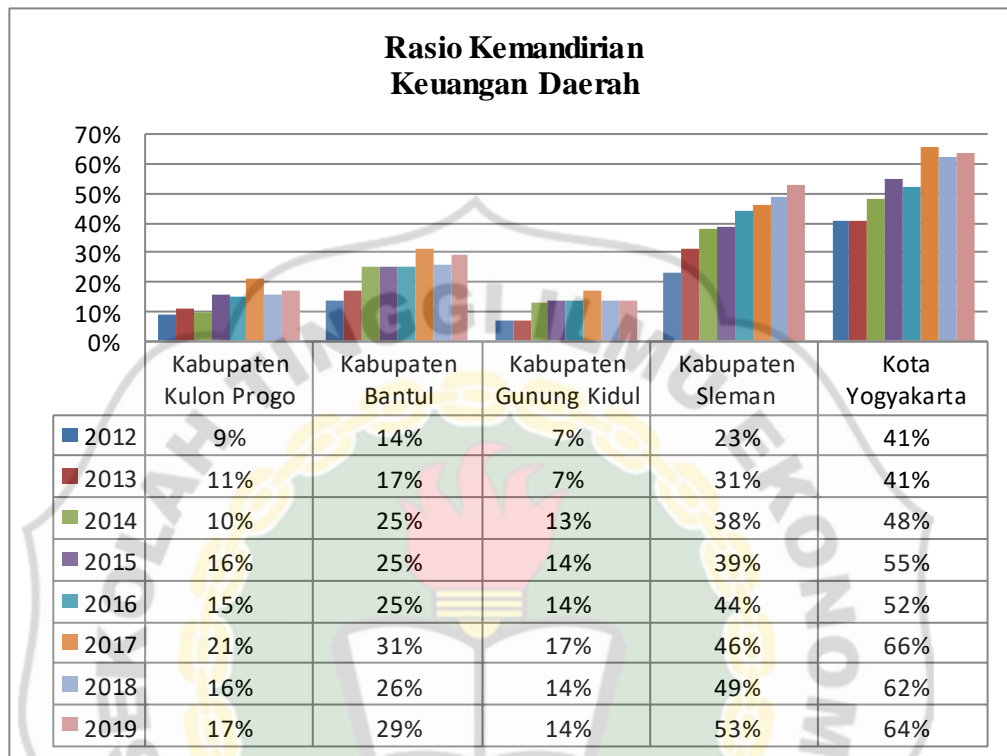
Sumber : Hasil olahan data sekunder dari Statistik Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2019

Dari tabel 1.4 dan grafik 1.3 menunjukkan besarnya perolehan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dari lima kabupaten/ kota tidak sebesar dengan perolehan pajak daerah, tetapi melebihi perolehan retribusi daerah. Apabila dilihat pada lima kabupaten/ kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terbesar ialah Kabupaten Bantul di tahun 2017. Semakin meningkat hasil perolehan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah maka pendapatan daerahnya juga semakin banyak.

Banyaknya potensi terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah daerah diharapkan bisa membentuk pemerintah yang mandiri di bidang keuangannya. Kemandirian keuangan daerah bisa diketahui melalui membandingkan antara PAD dengan transfer bantuan pusat dan pinjaman, hal ini dapat terlihat seberapa besar campur tangan dari pemerintah pusat terhadap dana setiap daerahnya. Gambar 1.4 rasio kemandirian keuangan daerah lima kabupaten/ kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Gambar 3
Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Lima Kabupaten/ Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber : Hasil olahan data sekunder dari Statistik Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2019

Dari gambar 1.4 menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berkisar pada 7%-66% di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam periode waktu 2012-2019. Apabila dilihat yang memiliki kemampuan keuangan daerah yang paling rendah berada di Kabupaten Gunung Kidul, karena rasio kemandirian keuangan daerah tidak melebihi 20% di tahun 2012-2019. Hal ini dapat dikatakan bahwa Kabupaten Gunung Kidul tingkat ketergantungannya pada penghasilan transfer dari pemerintah pusat tergolong tinggi, sehingga peran pemerintah pusat sangat besar daripada kemandirian pemerintah daerah saat mendanai kebutuhan pembelanjaan daerahnya. Sedangkan bagi kabupaten/ kota yang memiliki kemampuan keuangan daerah kategori sedang adalah Kota Yogyakarta, karena rasio kemandirian keuangan daerah berada dikisaran 50-75% di tahun 2015-2019. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah semakin tinggi maka campur tangan dari pemerintah pusat terhadap penghasilan transfer semakin kecil.

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan, maka peneliti mendorong untuk meneliti pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap kemandirian keuangan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

TINJAUAN TEORI

Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009, pajak daerah merupakan iuran yang tidak bisa dihindari kepada daerah terutang, bisa dilakukan oleh perorangan ataupun lembaga sifatnya memaksakan sesuai dengan UU yang berlaku, dimana tidak memperoleh imbalan secara langsung, tetapi dimanfaatkan bagi kepentingan daerahnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai perwujudan dari kesejahteraan masyarakat.

Berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 yang bagian dari amanah UU Nomor 28 tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah, menunjukkan bahwa jenis pajak yang pemungutannya didasarkan pada ketetapan Kepala Daerah dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak mencakup pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota.

Retribusi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009, retribusi daerah ialah penghasilan daerah yang dibayarkan atas jasa atau sebagai diberikannya perizinan khusus yang berasal dari pemerintah daerah bagi kebutuhan perorangan ataupun lembaga sesuai dengan UU yang berlaku, dimana pembayar retribusi daerah mendapat imbalan secara langsung.

Berlandaskan pasal 1 UU Nomor 28 tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah dapat dijelaskan bahwa retribusi daerah dibagi menjadi 3 yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut (Devas, Binder , Booth, Davey, & Kelly, 1989) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ialah sekumpulan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam jumlah kecil, mencakup pendapatan dari menjual alat berat dan material yang tidak berwujud, pendapatan dari sewa, bunga tabungan bank dan simpanan bank, serta denda dari kontraktor. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah bisa diartikan penghasilan daerah yang diperoleh kecuali dari hasil pajak dan retribusi daerah serta kekayaan daerah yang dipisahkan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah bisa didefinisikan bahwa pemerintah mampu melaksanakan sendiri pembelanjaan dan pertanggungjawaban keuangannya sesuai prinsip desentralisasi. Pengukuran kemandirian daerah yaitu dengan melihat besarnya bantuan atas pemberian pemerintah pusat kepada daerah, oleh karena itu yang disebut daerah mandiri merupakan yang paling sedikit menerima bantuan dari pemerintah pusat. Ada suatu rasio yang dipakai saat pengukuran kemandirian keuangan daerah yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) ialah tingkat kemampuan daerah dalam mendanai sendiri untuk kegiatan pemerintahan, pengembangan dan peningkatan layanan daerah untuk orang yang sudah melakukan pembayaran pajak dan retribusi sebagai hasil penerimaan yang dibutuhkan di daerah tersebut. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dalam Halim (2007) bisa dibuat rumus yaitu :

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer (Bantuan) Pusat, Provinsi, dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam (Halim 2007:169) menjelaskan bahwa pola hubungan kemandirian keuangan daerah saat penyelenggaraan otonomi daerah meliputi empat jenis, meliputi:

- a. Pola hubungan instruktif, peran pemerintah pusat lebih menonjol dibandingkan dengan kemandirian keuangan daerah maka tidak bisa mencapai otonomi daerah.
- b. Pola hubungan konsulatif, telah berkurangnya keterlibatan pemerintah pusat dikarenakan masyarakat percaya bahwa daerah tersebut lebih bisa menyelenggarakan otonomi.
- c. Pola hubungan partisipatif, peran pemerintah pusat semakin menurun karena tingkat kemandirian daerah sudah mendekati kemampuan untuk menyelenggarakan dalam hal otonomi.
- d. Pola hubungan delegatif, tidak ada keterlibatan dari pemerintah pusat dikarenakan setiap daerah memang bisa mandiri saat menyelenggarakan otonomi daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 2. 1
Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

| Kemampuan Keuangan Daerah | Rasio Kemandirian (%) | Pola Hubungan |
|---------------------------|-----------------------|---------------|
| Rendah Sekali | 0 – 25 | Instruktif |
| Rendah | 25 - 50 | Konsultatif |
| Sedang | 50 – 75 | Partisipatif |
| Tinggi | 75 - 100 | Delegatif |

Sumber : Halim, 2007

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Salah satu sumber penghasilan pemerintah daerah otonom ialah pemotongan pajak daerah, sehingga pendapatan tersebut diperlukan untuk pemerintah daerah. Telah banyak penelitian yang membahas pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Salah satunya oleh (Mukarramah, 2017) yang dilakukan di Jawa Barat. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, peneliti menyusun hipotesis pertama dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁ : Pajak daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Tidak jauh berbeda dengan pajak daerah, retribusi daerah juga termasuk penghasilan daerah terpenting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Febriyanti & Faris, 2019) tentang pengaruh retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah yang dilaksanakan di Jawa Timur, menyatakan retribusi daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, peneliti menyusun hipotesis kedua dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₂ : Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Kenaikkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengakibatkan peningkatan PAD, dengan begitu peningkatan PAD bisa menurunkan keterlibatan bantuan pemerintah pusat maka kemandirian daerah juga mengalami peningkatan. Penelitian yang dilakukan oleh (Novalistia, 2016) mengenai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah yang dilakukan di Jawa Tengah. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, peneliti menyusun hipotesis ketiga dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₃ : Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

METODE PENELITIAN

Penelitian ini untuk mengetahui fakta secara empiris tentang pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di lima kota/kabupaten Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam periode 8 tahun yaitu dari tahun 2012-2019. Populasi dalam penelitian ini antara lain empat kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Sleman, serta dengan satu kota yaitu Kota Yogyakarta. Jenis data yang dipakai pada penelitian ini ialah data sekunder, berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2019 yang didapatkan melalui situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) (www.bps.go.id) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (www.djpk.kemenkeu.go.id). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 sampel yang didapatkan dari 4 kabupaten dan 1 kota dengan periode waktu 8 tahun.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen di penelitian ini ialah pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sementara untuk variabel dependennya ialah kemandirian keuangan daerah.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian antara lain analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda dilengkapi dengan uji asumsi klasik serta uji hipotesis. Dalam

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penelitian ini jenis data yang digunakan adalah *cross-section* dan *time series*. Peneliti melakukan uji data seluruh metode tersebut dengan program SPSS Versi 15.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang berada di bagian selatan Pulau Jawa yang dibatasi lautan Indonesia, untuk bagian barat, barat laut, tenggara, dan timur laut dibatasi dengan Provinsi Jawa Tengah, serta terletak pada 8°30' – 7°20' Lintang Selatan dan 109°40' – 111°0' Bujur Timur. Batas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ialah bagian timur laut oleh Kabupaten Klaten, bagian barat laut oleh Kabupaten Magelang, bagian barat oleh Kabupaten Purworejo, dan bagian tenggara oleh Kabupaten Wonogiri. Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kota, meliputi Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Sleman, serta Kota Yogyakarta. Sementara untuk luas wilayahnya ±3.185,80 km².

Analisis Data dan Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Olahan Analisis Statistik Deskriptif

| Variabel | Minimum | Maksimum | Rata-rata | Standar Deviasi |
|----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| PD | 8.448.290.000 | 599.500.000.000 | 190.618.496.600 | 182.044.385.006 |
| RD | 6.777.315.000 | 56.898.390.000 | 31.288.453.825 | 14.009.414.824 |
| LLPADYS | 31.325.551.000 | 276.910.534.000 | 150.088.493.875 | 60.229.060.538 |
| KKD (%) | 7.00 | 66.00 | 28.9750 | 17.37444 |

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS Versi 15

Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel pajak daerah (PD) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki rata-rata sebesar Rp190.618.496.600, sementara untuk standar deviasinya sebesar Rp182.044.385.006. Nilai minimum dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp8.448.290.000, sedangkan untuk nilai maksimum sebesar Rp599.500.000.000 dimiliki oleh Kabupaten Sleman di tahun 2019.

Variabel retribusi daerah (RD) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh rata-rata sebesar Rp31.288.453.825 dan standar deviasinya sebesar Rp14.009.414.824. Nilai minimum sebesar Rp6.777.315.000 berada di Kabupaten Kulon Progo pada

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tahun 2014 dan nilai maksimum sebesar Rp56.898.390.000 berada di Kota Yogyakarta di tahun 2014.

Variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (LLPADYS) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp150.088.493.875 dan standar deviasinya sebesar Rp60.229.060.538. Nilai minimum yang dimiliki variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp31.325.551.000 berada di Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2012 sedangkan untuk nilai maksimum sebesar Rp276.910.534.000 berada di Kabupaten Bantul pada tahun 2017.

Variabel kemandirian keuangan daerah (KKD) memiliki rata-rata sebesar 28,9750% sedangkan standar deviasinya sebesar 17,37444%. Nilai minimum variabel KKD sebesar 7,00% berada di Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2012 dan 2013, sementara nilai maksimum sebesar 66,00% berada di Kota Yogyakarta di tahun 2017.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Olahan Uji Kolmogorov Smirnov (K-S)

| | | |
|-----------------------|--|-------|
| N | | 40 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1,086 |
| Asymp. Sig (2-tailed) | | 0,189 |

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS Versi 15

Dari tabel 2 yang tersaji, bisa diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yang diperoleh sebesar 0,189, nilai probabilitas pada pengujian di atas lebih besar dari tingkat signifikansinya yaitu $0,189 > 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa data pada penelitian ini memiliki distribusi normal dan memenuhi kriteria uji normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3
Hasil Olahan Uji Multikolinearitas

| Variabel | Tolerance | VIF | Hasil |
|----------|-----------|-------|---------------------------------|
| PD | 0,389 | 2,572 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| RD | 0,460 | 2,172 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| LLPADYS | 0,706 | 1,417 | Tidak terjadi multikolinearitas |

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS Versi 15

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dari pengujian multikolinearitas tabel 3 yang tersaji, terlihat bahwa nilai VIF yang diperoleh dari masing-masing variabel kurang dari 10 yaitu PD sebesar 2,572, RD sebesar 2,172, dan LLPADYS sebesar 1,417. Apabila menggunakan nilai *tolerance* dari tabel di atas ketiga variabel PD, RD, dan LLPADYS lebih besar dari 0,10, yaitu masing-masing sebesar 0,389, 0,460, dan 0,760, dengan demikian hasil dari pengujian ini menyimpulkan bahwa ketiga variabel tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4
Hasil Olahan Uji Park

| Variabel | Nilai Signifikansi | Hasil |
|----------|--------------------|------------------------------------|
| PD | 0,478 | Tidak terdapat heteroskedastisitas |
| RD | 0,062 | Tidak terdapat heteroskedastisitas |
| LLPADYS | 0,067 | Tidak terdapat heteroskedastisitas |

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS Versi 15

Dari tabel 4 yang tersaji dengan uji park, menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh dari masing-masing variabel lebih besar 0,05 yaitu PD sebesar 0,478, RD sebesar 0,062, dan LLPADYS sebesar 0,067. Berdasarkan hasil pengujian dari ketiga variabel tersebut bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5
Hasil Olahan Uji Autokorelasi Metode *Runs-Test*

| | |
|------------------------------|--------|
| Z | -0,801 |
| <i>Asymp. Sig (2-tailed)</i> | 0,423 |

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS Versi 15

Berdasarkan pengujian autokorelasi dengan metode *Runs-Test* pada tabel 5 yang tersaji, terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yang diperoleh sebesar 0,423 lebih besar dari 0,05. Maka membuktikan bahwa dari hasil pengujian tersebut tidak terjadi autokorelasi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6
Hasil Olahan Regresi Linier Berganda

| Variabel | Coefficient | Standard Error |
|-----------|-------------|----------------|
| Constant | -3,145 | 1,074 |
| LnPD | 0,517 | 0,049 |
| LnRD | -0,093 | 0,078 |
| LnLLPADYS | -0,018 | 0,092 |

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS Versi 15

Dari tabel 6 yang tersaji dengan regresi linier berganda, maka bentuk persamaan yang bisa dibuat sebagai berikut :

$$\text{LnKKD} = -3,145 + 0,517 \ln\text{PD} - 0,093 \ln\text{RD} - 0,018 \ln\text{LLPADYS} + e$$

Uji Hipotesis Uji Parsial (Uji t)

Tabel 7
Hasil Olahan Uji Parsial (Uji t)

| Variabel | Coefficient | t hitung | t tabel | Signifikansi |
|----------|-------------|----------|---------|--------------|
| PD | 0,517 | 10,517 | 2,02809 | 0,000 |
| RD | -0,093 | -1,192 | 2,02809 | 0,241 |
| LLPADYS | -0,018 | -0,192 | 2,02809 | 0,849 |

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS Versi 15

Dari tabel 7 yang tersaji pada uji parsial, terlihat bahwa variabel Pajak Daerah (PD) memperoleh nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung 10,517 lebih besar dari t tabel 2,02809 dan berada di daerah penolakan H_0 , dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2019 secara statistik bisa diterima, yang artinya Pajak Daerah (PD) memiliki pengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD).

Variabel Retribusi Daerah (RD) memperoleh nilai signifikansi 0,241 lebih besar dari 0,05 dan memiliki t hitung bertanda negatif sebesar 1,192 lebih kecil dari t tabel 2,02809 dan berada di daerah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penerimaan H_0 , dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2019 secara statistik ditolak, yang artinya Retribusi Daerah (PD) tidak berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD).

Variabel Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADYS) memiliki nilai signifikansi 0,849 lebih besar dari 0,05 dengan t hitung bertanda negatif sebesar 0,192 lebih kecil dari t tabel 2,02809 dan berada di daerah penerimaan H_0 , dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2019 ditolak secara statistik, yang artinya Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADYS) tidak berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD).

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 8
Hasil Olahan Uji Simultan (Uji F)

| | |
|--------------|---------|
| F | 124,023 |
| Signifikansi | 0,000 |

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS Versi 15

Dari tabel 8 yang tersaji, terlihat bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan dengan uji F di atas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan jika dibandingkan nilai F hitung dengan F tabel dalam tabel distribusi F yaitu F hitung sebesar 124,023 lebih besar dari F tabel sebesar 2,87. Berdasarkan pengujian tersebut menyatakan bahwa Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADYS) mampu menjelaskan secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD).

Koefisien Determinan (R^2)

Tabel 9
Hasil Olahan Koefisien Determinan (R^2)

| N | Multiple R | R Square | Adjusted R Square | Standard Error |
|----|------------|----------|-------------------|----------------|
| 40 | 0,955 | 0,912 | 0,904 | 0,08549 |

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS Versi 15

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan pengujian pada tabel 9 yang tersaji, bisa diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) yang diperoleh sebesar 0,912 atau 91,2%. Hasil tersebut menyatakan bahwa besarnya variabel Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADYS) mampu menjelaskan Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) sebesar 91,2%, dan untuk sisanya sebesar 8,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian yang telah peneliti lakukan dilakukan dengan tujuan menguji Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, hasilnya dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Retribusi Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebaiknya lebih bisa mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber PAD, terutama pada retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah agar mengalami peningkatan lebih baik lagi sehingga kemandirian keuangan daerah bisa dengan mudah terwujud. Peningkatan sumber PAD yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan sumber dana bagi pemerintah daerah.
2. Peneliti Selanjutnya
Saran untuk peneliti selanjutnya ialah diharapkan untuk menggunakan dan menambah variabel dan sampel yang bervariasi supaya mendapatkan hasil penelitian yang berbeda. Selain itu, bisa juga menggunakan periode waktu yang lebih terbaru dengan rentang waktu yang lebih panjang supaya

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mendapatkan hasil penelitian yang lebih lengkap, luas, dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. (2016). *Statistika Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2021, April 15). *Ringkasan APBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Retrieved from Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: <http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/>
- BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2021, April 15). *Statistika Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi D.I.Yogyakarta: <https://yogyakarta.bps.go.id>
- Devas, N., Binder, B., Booth, A., Davey, K., & Kelly, R. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. (M. Maris, Trans.) Jakarta: UI Press.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021, April 18). Retrieved from www.djpk.kemenkeu.go.id
- DJPB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2021, Mei 17). *Sejarah dan Letak Geografis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Retrieved from DJPB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/diy/id/profil/sejarah.html>
- Erawati, N. T., & Suzan, L. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada Dpkad Kota Bandung Periode 2009-2013). *Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 2, No.3, 3259-3266.
- Febriyanti, F., & Faris, M. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, V (2), 162-175.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Kustianingsih, N., & Muslimin, A. K. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6 (6), 82-91
- Lukitawati, L. J., & Pringgabayu, D. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 1 (2), 1-11.
- Mukarramah, H. (2017). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Lima Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2014*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jakarta.
- Nggilu, F., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16 (4), 623-635.
- Novalistia, R. L. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Accounting*, 2 (2), 1-25.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunyoto, D. (2011). *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Yogyakarta: CAPS.

Widarjono, A. (2010). *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.

Wijaya, T. (2009). *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

